

MODEL PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

Almasdi Syahza

syahza.almasdi@gmail.com

Suarman

Lembaga Penelitian Universitas Riau

ABSTRACT

Poverty is phenomenal problem in the history of Indonesia as nation-state. The poverty causes neglected and isolated areas where development disparity appears and affects the increasing lag of poor villages. One of the regencies in Province of Riau felt this condition is Regency of Kepulauan Meranti. Most of villages, there are 59 vilages (80.82%), are disadvantaged areas. The total of household are 45,564, and 56.76% of them (25,863 household) are poor which consist of 114,496 souls. Whereas this area has strategic geographic location because it is in the line of shipping and international trade Selat Malaka, near to neighbor country Malaysia and Singapore, and has potential as hinterland area of free trade zone Batam, Bintan, and Karimun (FTZ-BBK). The purpose of this research is to arrange the strategic plan model of disadvantaged area development in effort of accelerating rural economic development. The research conducted through survey by using development research. Technique used for sampling is purposive sampling method and analysis method used for this research is method of quantitative and qualitative descriptive. The research found that the strategy of rural area development in effort to spur economic growth is cross-sectoral approach in all fields. In addition, the research also found the model of decreasing number of poor families by referring to four strategy principles of decreasing number of poor families.

Key words: disadvantaged areas, poverty, economic acceleration

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation-state*. Kemiskinan tersebut menyebabkan daerah terabaikan dan terisolir. Ketimpangan pembangunan muncul dan berdampak terhadap semakin tertinggalnya perkampungan miskin tersebut. Salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang merasakan kondisi tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagian besar dari desa yang ada yakni 59 desa (80,82%) merupakan desa tertinggal. Jumlah rumah tangga sebanyak 45.564 KK, dan sebesar 56,76% (25.863 KK) merupakan rumah tangga miskin yang terdiri dari 114.496 jiwa. Pada hal daerah ini memiliki letak geografis yang strategis karena berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional selat malaka, berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, serta berpotensi sebagai daerah *hinterland* dari kawasan *Free Trade Zone* Batam, Bintan dan Karimun (FTZ-BBK). Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana strategis model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi di pedesaan. Penelitian dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan (*Developmental Research*). Untuk pengambilan sampel masyarakat miskin digunakan teknik pengumpulan data dengan metode *purposive sampling*, analisis digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menemukan strategi pengembangan daerah pedesaan dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendekatan lintas sektoral di semua bidang. Penelitian juga menemukan model penurunan jumlah keluarga miskin dengan mengacu kepada empat prinsip strategi penurunan jumlah keluarga miskin.

Kata kunci: daerah tertinggal, kemiskinan, percepatan ekonomi

PENDAHULUAN

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state*. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga. Kemiskinan memperkuat arus urbanisasi ke kota. Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidupnya (*safety life*). Kemiskinan menyebabkan keterbelakangan penduduk dan termarginalkan kehidupan mereka. Mereka tidak punya akses baik akses pengembangan ekonomi maupun akses terhadap kebijakan. Mereka menerima apa adanya. Dampak ini menyebabkan daerah mereka merasa terabaikan dan terisolir. Ketimpangan pembangunan muncul dan berdampak terhadap semakin tertinggalnya perkampungan miskin tersebut.

Salah satu kabupaten yang merasakan ketimpangan dan banyaknya daerah tertinggal di Propinsi Riau adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten tersebut

merupakan pemekaran dari kabupaten induk yakni Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 5 (lima) kecamatan dengan luas daerah 3.707.84 km². Jumlah penduduk sebanyak 216.329 jiwa. Untuk lebih jelasnya luas daerah dan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan disajikan pada Tabel 1.

Daerah ini merupakan daerah yang terdiri dari empat gugus pulau besar, dan merupakan salah satu kabupaten kepulauan yang ada di Provinsi Riau. Bila ditinjau dari geografis, Kabupaten Kepulauan Meranti berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional Selat Malaka dan dua Negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Hal ini tentunya dapat dijadikan peluang bagi pengembangan potensi ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti juga berdekatan dengan pengembangan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 dan bahagian yang tidak terpisahkan dari *Free Trade Zone* Batam, Bintan dan Karimun (FTZ-BBK).

Tabel 1
Luas Daerah dan Jumlah Penduduk kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012
(keadaan sebelum pemekaran kecamatan)

No	Kecamatan	Luas Darah			Jumlah Penduduk	
		Km ²	Ha	%	Jiwa	%
1	Tebing Tinggi	849,50	84.950	22,91	85.742	39,64
2	Tebing Tinggi Barat	587,33	58.733	15,84	16.113	7,45
3	Rangsang	680,50	68.050	18,35	31.060	14,36
4	Rangsang Barat	241,60	24.160	6,52	34.370	15,89
5	Merbau	1.348,91	134.891	36,38	49.044	22,67
Jumlah		3.707,84	370.784	100,00	216.329	100,00

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2012

Batam sebagai *Free Trade Zone* (FTZ) yang sebelumnya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBBP), berubah menjadi suatu usaha untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional yang dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu (Zainal, 2010).

Kedudukan strategis Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdekatan dengan Batam sebagai FTZ terhadap Singapura akan memberikan berbagai peluang pengembangan kawasan *hinterland* Batam, melalui penetapan peran sinergis terhadap pengembangan aktifitas ekonomi dan sosial, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kawasan *hinterland* Batam (dalam hal ini wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti) dapat memainkan peranannya sebagai aktivitas pengembangan daerah baru dan penyangga ekonomi Kota Batam. Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu *hinterland* Batam dapat menjadi *key success factor dan stimulator* bagi penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Batam Bintan dan Karimum (KEK-BBK). Disamping itu dapat pula mentransformasi diri agar memiliki daya saing dalam menangkap berbagai peluang ekonomi KEK-BBK. Pengembangan kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendukung KEK-BBK harus dicermati sejak dini agar berbagai konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti benar-benar fokus dan terstruktur dengan baik.

Dalam upaya menciptakan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai *hinterland* KEK Batam, diperlukan arah pengembangan

antara lain memperkuat fungsi Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, infra struktur, peningkatan sumber daya manusia tempatan, pariwisata, yang kesemuanya itu tentunya haruslah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Meranti itu sendiri.

Tantangan yang dihadapi oleh daerah otonom yang baru khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya di daerah. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang tepat sangat diperlukan. Arah penentuan kebijakan strategi tersebut adalah tercapainya kriteria-kriteria prioritas pembangunan berupa penurunan bentuk-bentuk ketimpangan, kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan daerah. Sedangkan harapan dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Dalam kaitan tersebut, salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat dan terarah (Syamsuar, 2010).

Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (2012) di daerah tersebut terdapat 73 desa (Tabel 2). Sebagian besar dari desa yang ada yakni sebanyak 59 desa (80,82%) merupakan desa tertinggal. Jumlah rumah tangga sebanyak 45.564 KK, dan sebesar 34,84% (15.876 KK) merupakan rumah tangga miskin. Banyaknya desa tertinggal dan keluarga prasejahtera di daerah ini merupakan indikasi bahwa pembangunan ekonomi selama ini (semasa bergabung dengan kabupaten induk) belum menyentuh rakyat lapisan bawah sehingga dengan adanya krisis menyebabkan daerah-daerah pedesaan yang terpencil menjadi rentan sehingga terpuruk menjadi daerah miskin. Hal ini disebabkan selain oleh karena kebijaksanaan yang salah

dan distortif pada masa lalu juga karena kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah pesisir.

Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah otonom baru adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan tersebut. Pelaksana kebijakan di daerah harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang merata dan berimbang di setiap kecamatan. Dengan kondisi dan potensi yang ada, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan percepatan ekonomi di Kabupaten kepulauan Meranti dengan tingkat kesejahteraan yang minimal.

Posisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang sangat menguntungkan dari segi *hinterland* KEK Batam, maka ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di daerah dapat di kurangi dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan ini adalah dengan program pembangunan ekonomi untuk memberdayakan masyarakat pedesaan. Sesuai dengan ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan maka program pembangunan ekonomi yang cocok adalah pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya pertanian pedesaan dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi. Program ini dapat berbentuk pem-

angunan pertanian tanaman perkebunan, tanaman makanan dan hortikultura serta perikanan.

Dari uraian yang dikemukakan, maka penelitian ini diharapkan dapat menemukan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya membangun kabupaten yang mandiri. Berkaitan dengan penelitian ini, beberapa pertanyaan berikut dapat dijadikan acuan dalam menyusun perumusan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau, yaitu: 1) Seberapa besar potensi sektor ekonomi untuk dikembangkan dalam hal perwilayahan pengembangan potensi ekonomi berbasis agribisnis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan Kabupaten Kepulauan Meranti; 2) Seberapa besar potensi perekonomian daerah, yang terkait dengan struktur ekonomi, potensi sumberdaya, perkembangan dan keterkaitan sektoral yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan; 3) Bagaimanakah perumusan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 2
Jumlah Rumah Tangga, Desa, Rumah Tangga Miskin, dan Desa Tertinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 (keadaan sebelum pemekaran kecamatan)

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Jumlah Desa	Rumah tangga Miskin		Desa Tertinggal	
				Miskin	%	Desa	%
1	Tebing Tinggi	17.745	16	4.953	27,91	10	62,50
2	Tebing Tinggi Barat	3.585	8	1.598	44,57	6	75,00
3	Rangsang	6.729	13	2.843	42,25	11	84,62
4	Rangsang Barat	6.608	15	2.307	34,91	14	93,33
5	Merbau	10.897	21	4.175	38,31	18	85,71
	Jumlah	45.564	73	15.876	34,84	59	80,82

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2012

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyusun rencana strategis model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menentukan strategi percepatan pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan melalui pemanfaatan potensi sektor ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti; 2) Menentukan potensi perekonomian daerah, yang menyangkut struktur ekonomi, potensi sumberdaya, perkembangan dan keterkaitan sektoral yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan yang berbasis agribisnis; 3) Menentukan perumusan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

TINJAUAN TEORETIS

Pemberdayaan Masyarakat dan Kemiskinan

Paradigma pembangunan telah diwarnai konsep pemberdayaan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga ketiga pihak memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam mencapai tujuan pembangunan di segala bidang. Ketiga komponen tersebut harus bersinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan. Pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan mampu mengkoordinasikan berbagai program atau kegiatan yang ada, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif, dan swasta seharusnya berkontribusi secara wajar didalam pembangunan daerah sebagai implementasi tanggung jawab sosialnya (Sumaryo, 2011).

Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Tanpa mengecilkkan arti dan peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Meskipun dari beberapa contoh kasus yang disebutkan

sebelumnya faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud *self-organizing* dari masyarakat namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* perlu direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau sering dikenal dengan semboyan *put the farmers first*. Paradigma pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya. Keterlibatan tersebut termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akan lebih adil bagi masyarakat (Pemberdayaan, 2009).

Dari data Bank Dunia, penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan (Sahdan, 2009). Ke-

lemahan pembangunan di masa lalu tidak melibatkan masyarakat miskin sebagai aktor pelaku pembangunan, mereka lebih banyak terlibat sebagai buruh kasar dalam pelaksanaan pembangunan. Keterbatasan berfikir juga menjadi penghalang dapat ikut campur dalam proses pembangunan. Ketidaktahuan ini menyebabkan timbulnya masyarakat miskin dan daerah miskin.

Konsep Daerah tertinggal dan Pusat Pertumbuhan

Daerah-daerah tertinggal sulit untuk ditingkatkan kesejahteraannya karena selain pembangunan yang selama ini distortif juga karena masyarakat pedesaan tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan; seperti pendidikan dan keterampilan yang rendah, tidak ada modal usaha, tidak punya tanah atau luasnya yang tidak layak dan lain-lain. Di samping itu masyarakat daerah tertinggal tersebut relatif terisolir dengan jumlah penduduk yang relatif jarang sehingga potensinya untuk berkembang menjadi terhambat. Untuk mengatasi kesenjangan ini maka perlu dilakukan terobosan dalam bentuk program penataan ruang, penataan pemukiman penduduk, dan penyempurnaan sarana dan prasarana sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu akan mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata karena pertumbuhan ekonomi ini bisa saja hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, terutama di perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Berdasarkan data yang ada, di daerah Riau terjadi kesenjangan (disparitas) terutama antar daerah dan sektor serta antar golongan masyarakat. Demikian juga kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antar golongan dalam masyarakat. Kesenjangan ini cukup berbahaya karena menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial yang pada gilirannya membahayakan kestabilan nasional. Akibat lanjut dari

kesenjangan ini adalah munculnya daerah-daerah tertinggal dan miskin yang terbelakang dalam pembangunan terutama daerah-daerah di pedesaan. (Syahza, 2005).

Kesenjangan di daerah tertinggal ini semakin diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan non-pertanian (ekonomi perkotaan). Di daerah pedesaan sektor pertanian sampai saat ini masih memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian pedesaan, karena sebagian besar kegiatan pertanian masih dilaksanakan secara konvensional. Hal ini terjadi tidak saja dilingkup pembangunan pertanian di wilayah kabupaten, tapi juga kegiatan tersebut dilakukan di wilayah perkotaan. Di daerah pedesaan dalam pengembangan sektor pertanian terlihat peran dominan pedagang pengumpul dan bandar besar (produsen sekunder) sebagai penguasa modal dan mengatur tataniaga komoditi pertanian. Akibatnya petani sebagai produsen primer diperkirakan hanya memperoleh manfaat keuntungan dari kegiatan usaha tani dan tataniaga sekitar 5-15 persen, bahkan sering merugi. Sementara 15-95 persen manfaat keuntungan diperoleh oleh produsen sekunder (Kastaman, 2007).

Bagi Indonesia dalam pembangunan di masa datang akan menghadapi tiga kelompok permasalahan mendasar, yaitu; Pertama, lapangan kerja produktif dan pengangguran. Masalah ini terkait dengan ketimpangan antara produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dan produktivitas di sektor sekunder (industri dan konstruksi); Kedua, ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa; dan ketiga, ketidakseimbangan ekonomi antar daerah (Syahza, 2007).

Kesenjangan Ekonomi Masyarakat

Penyebab kesenjangan ekonomi di dalam negeri adalah kebijakan-kebijakan pemerintah lebih mengutamakan ke-

pentingan pemodal industri di kota-kota ketimbang rakyat pedesaan. Di tingkat desa, pemerintah lebih banyak menerapkan kebijakan yang menguntungkan sebagian kecil elit desa daripada sebagian besar buruh tani (Alim, 2007). Hasil penelitian Syahza. A dan Suarman (2008), menjelaskan untuk mengatasi kesenjangan antara daerah-daerah tertinggal dan maju ini pemerintah melakukan berbagai usaha untuk mengkatrol daerah tertinggal sekaligus memberdayakan keluarga miskin (petani), antara lain dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui bantuan modal, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, memberikan bimbingan dan pelatihan. Di dalam sektor pertanian, dikenal bermacam-macam jenis kredit untuk membantu permodalan usaha petanian, perikanan, dan perkebunan. Namun usaha yang dilakukan tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan. Untuk itu perlu adanya terobosan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Terobosan ini dilakukan harus disesuaikan dengan potensi masyarakat dan ketersediaan sumberdaya yang ada, misalnya bantuan modal dan pendampingan untuk membantu pemasaran dan manajemen produksi. Untuk keberhasilan program ini adalah penting bahwa program bimbingan dan pelatihan ini harus dilakukan secara berkesinambungan untuk beberapa periode dan dievaluasi.

Di Indonesia sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian dengan lebih baik. Lebih lanjut diungkapkan Suyono (2007), dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, sektor pertanian harus menjadi sasaran utama. Sektor ini harus dijadikan pijakan kokoh, sehingga di pedesaan dapat tercapai swasembada berbagai produk pertanian, terutama pangan, sebelum memasuki era pengindustrian. Lebih khusus, ketahanan pangan lokal

harus tercapai lebih dahulu dan pertanian harus mendapatkan prioritas utama.

Dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan diperlukan konsistensi. Hal itu harus menjadi konsepsi yang benar-benar memungkinkan masyarakat pedesaan untuk dapat bertahan dalam situasi perekonomian yang serba sulit seperti saat ini. Selain itu, meningkatkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kemandirian yang nantinya dapat menciptakan suasana kondusif. Jadi, hal itu memungkinkan masyarakat pedesaan untuk berkembang dan memperkuat daya saing serta potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat pedesaan juga harus mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap masyarakat. Upaya perlindungan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang akibat berlakunya mekanisme pasar dan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam hal ini, tampaknya sulit diterapkan mekanisme pasar. Masyarakat desa jelas akan kalah bersaing. Mereka tidak punya apa-apa selain tenaga-tenaga yang pada umumnya kurang terlatih (Basri, 2007). Banyak faktor yang dijadikan sebagai tolok ukur suatu desa masuk dalam kategori desa tertinggal. Faktor-faktor itu adalah ketersediaan jalan utama desa, lapangan usaha bagi mayoritas penduduk, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas komunikasi, kepadatan penduduk per km², sumber air minum, sumber bahan bakar, persentase penggunaan listrik dan persentase pertanian (Yunita, 2006).

Menurut Edy (2009), tolak ukur berhasilnya pembangunan daerah tertinggal dalam konteks pembangunan nasional didasari pada 3D atau tiga daya, yaitu: 1) daya struktur; 2) daya masyarakat; dan 3) daya koordinasi lintas-sektor yang mencakup program pembangunan antar sektor, antar daerah, dan pembangunan khusus. Dalam pelaksanaan, ketiga daya itu harus dilakukan secara terpadu, terarah, dan sistematis. Pada akhirnya, pemberian ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada

rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dapat bersinergi dengan upaya menanggulangi pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan.

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan, bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dan daerah maju. Kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal, memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

Hasil penelitian Suhendra (2010), untuk memacu pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal, diperlukan investasi untuk modal awal pembangunan. Pelaksanaan pembangunan ekonomi pada suatu wilayah investasi merupakan satu bagian yang penting dari pembangunan tersebut. Terutama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi akan tersedia berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan dalam menghasilkan output dan nilai tambah sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan investasi secara umum dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Investasi pemerintah pada umumnya dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan fisik dan nonfisik yang tidak dapat dibiayai dan dilaksanakan oleh masyarakat/swasta. Khusus untuk negara yang sedang berkembang, kemampuan pemerintah untuk biaya investasi tersebut sangat terbatas terutama untuk prasarana dan sarana infrastruktur.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan (*Developmental Research*). Guna mendapatkan informasi secara umum tentang keadaan daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan, maka penelitian ini banyak memanfaatkan data primer yang didapatkan melalui survey. Data sekunder hanya bersifat sebagai pendukung.

Secara spesifik ruang lingkup studi Model Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diterangkan sebagai berikut: 1) Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah. Meliputi kebijakan pengembangan tataruang daerah, pengembangan ekonomi daerah, sektor-sektor prioritas/strategis yang perlu diperhatikan dalam pengembangan daerah tertinggal; 2) Kajian terhadap wilayah yang mempunyai indikasi potensial untuk pengembangan daerah tertinggal; 3) Analisis ekonomi wilayah studi; 4) Kajian terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan desa tertinggal.

Penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau dengan pemilihan lokasi dilakukan secara *cluster* di daerah pedesaan dengan pertimbangan jumlah desa tertinggal, keluarga miskin dan jumlah penduduk per kecamatan. Untuk pengambilan sampel masyarakat miskin digunakan teknik pengumpulan data dengan metode *purposive sampling*. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa letak lokasi penelitian yang berpecahan, karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian yang beragam, dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh melalui kuesioner dan wawancara secara mendalam.

Data yang dikumpulkan merupakan informasi dari masyarakat dan pemuka masyarakat di pedesaan, antara lain: potensial wilayah untuk pengembangan,

komoditas yang telah diusahakan masyarakat pedesaan dan komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan; data sosial dan ekonomi masyarakat. Variabel yang diukur dalam studi ini adalah variabel yang diperlukan untuk pembangunan desa tertinggal yang meliputi kelayakan usaha dan kelayakan berkembang di masa depan.

Guna mengetahui kedua kelayakan tersebut maka diperlukan data-data yang dapat memberikan informasi dalam studi ini, antara lain: 1) Data kebijaksanaan pembangunan daerah, yang meliputi; kebijaksanaan pengembangan tata ruang daerah; kebijaksanaan pengembangan ekonomi daerah; dan kebijaksanaan terhadap sektor-sektor prioritas/strategis yang perlu diperhatikan dalam pengembangan desa tertinggal; 2) Data wilayah yang mempunyai indikasi potensial untuk pengembangan, meliputi: analisis ketersediaan lahan, penggunaan dan status lahan, status hutan, geologi tata lingkungan dan rencana lintas sektoral; 3) Data tata ruang, meliputi: analisis sebaran kegiatan/aglomerasi; analisis sistem transportasi; dan analisis hirarki pemukiman; 4) Data ekonomi wilayah, meliputi: kondisi dan pertumbuhan ekonomi wilayah studi; sektor/komoditas yang memegang peranan penting; keterkaitan antar sektor; daya tarik wilayah terhadap swasta; sektor-sektor yang mempunyai peluang untuk dikembangkan; dan komoditas unggulan/kegiatan usaha yang potensial dikembangkan; 5) Pola kegiatan usaha sesuai dengan kesesuaian lahan dan keunggulan komparatif, antara lain: komoditas unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah studi; dan keterkaitan antara komoditas unggulan yang dikembangkan dengan sektor lain; dan 6) Data kelayakan usaha potensial/komoditas unggulan.

Memperoleh informasi data primer dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (*assesment*) secara umum di lapangan dalam waktu yang

relatif pendek. Kelebihan pendekatan ini adalah penelitian bisa mencakup daerah yang lebih luas dalam waktu relatif singkat untuk mendapatkan informasi yang luas secara umum. Pengumpulan informasi dan data dilakukan secara fleksibel, tidak terikat secara kaku dengan kuesioner. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasi dan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian, namun dilakukan dengan lebih mendalam dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang sesuatu hal. Kuesioner berperan sebagai pedoman umum untuk mengingatkan peneliti agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian (Syahza, 2013).

Kekhususan lain dari RRA ini adalah survey pengumpulan informasi dilakukan oleh peneliti yang multidisipliner atau peneliti yang mampu melihat masalah secara multidisipliner. Untuk mengurangi penyimpangan (bias) yang disebabkan oleh unsur subjektif peneliti maka setiap kali selesai melakukan interview dengan responden dilakukan diskusi diantara peneliti, saling tukar informasi tentang suatu masalah tertentu. Kalau ditemui perbedaan pandangan dalam suatu masalah yang disebabkan oleh adanya informasi yang keliru atau salah interpretasi maka dilakukan konfirmasi terhadap sumber informasi atau dicari informasi tambahan sehingga akan didapatkan persepsi yang sama diantara peneliti.

Selain dari data primer juga diperlukan data sekunder yang dikumpulkan dari kantor dan instansi yang terkait. Data sekunder ini akan dikonfirmasi dengan informasi dan data primer yang didapatkan ditingkat lapangan.

Data yang telah dikumpulkan dilanjutkan dengan pentabulasian sesuai dengan kebutuhan studi kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan secara deskriptif. Di samping itu juga dilakukan analisis kuantitatif melalui pendekatan konsep pengembangan tata ruang wilayah ditinjau

dari berbagai aspek, serta disesuaikan dengan keadaan fisik, ekonomi, kebijakan pemerintah, daya dukung lahan, serta sosial budaya masyarakat.

Penelitian ini merupakan kajian menemukan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sasaran yang hendak dicapai adalah memacu pertumbuhan dan percepatan pembangunan di daerah tertinggal dengan sasaran peningkatan taraf hidup masyarakat desa tertinggal. Untuk itu perlu diinventarisir sumberdaya yang berpotensi untuk dikembangkan dari sisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tempatan.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif terutama terhadap data kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif melalui pendekatan konsep ekonomi kerakyatan dari berbagai aspek, serta disesuaikan dengan keadaan fisik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti jauh tertinggal dibandingkan dengan keadaan ekonomi daerah lain di Propinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Dari data yang ada diperoleh informasi jumlah rumah tangga miskin sebanyak 25.863 rumah tangga (RT) yang terdiri dari 114.496 jiwa. Jumlah anak yang bersekolah sebanyak 23.461 anak (berdasarkan Usia 7 s/d 18 th) dan jumlah anak tidak sekolah 7.474 anak. Dari sisi perkerjaan sebanyak 49.070 jiwa bekerja (usia produktif L/P), tidak bekerja (pada usia produktif L/P) sebanyak 23.621 jiwa.

Terkait dengan lapangan usaha, jumlah kepala rumah tangga yang bekerja 23.322 KRT (terbagi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, indus-

tri pengolahan, pertambangan, bangunan, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya). Jumlah individu yang berkerja 48.753 (terbagi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, pertambangan, bangunan, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya).

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk agak rumit bila dibandingkan dengan pembangunan ekonomi daerah lain di Propinsi Riau. Kondisi ini disebabkan karena adanya kendala yang dihadapi di daerah, antara lain: 1) kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau; 2) angka kemiskinan masih relatif tinggi; 3) terbatasnya infrastruktur; 4) rendahnya kualitas SDM; dan 5) degradasi lingkungan hidup.

Sesuai dengan kondisi daerahnya, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang berada di wilayah pesisir Propinsi Riau. Faktor geografi tersebut menjadi kesulitan utama dalam pembangunan, karena membutuhkan dana yang besar untuk membangun infrastruktur. Berdasarkan hasil kajian di lapangan, dapat diketahui dan diidentifikasi angka kemiskinan serta permasalahan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Angka Kemiskinan dan Issue Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) angka kemiskinan relatif tinggi (42,5%), atau 75.000 jiwa; 2) infrastruktur dasar belum memadai (rumah tidak layak huni, jalan, abrasi, air bersih, banjir, pelabuhan, listrik); 3) masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, (masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan); 4) fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan yang relatif masih terbatas; 5) angka kematian ibu dan bayi yang relatif masih tinggi (sarana dan prasarana Kesehatan masih belum memadai); 6) penangkapan ikan masih menggunakan alat tradisional; 7) perkebunan karet milik masyarakat yang sudah tua, sehingga diperlukan proses revitalisasi

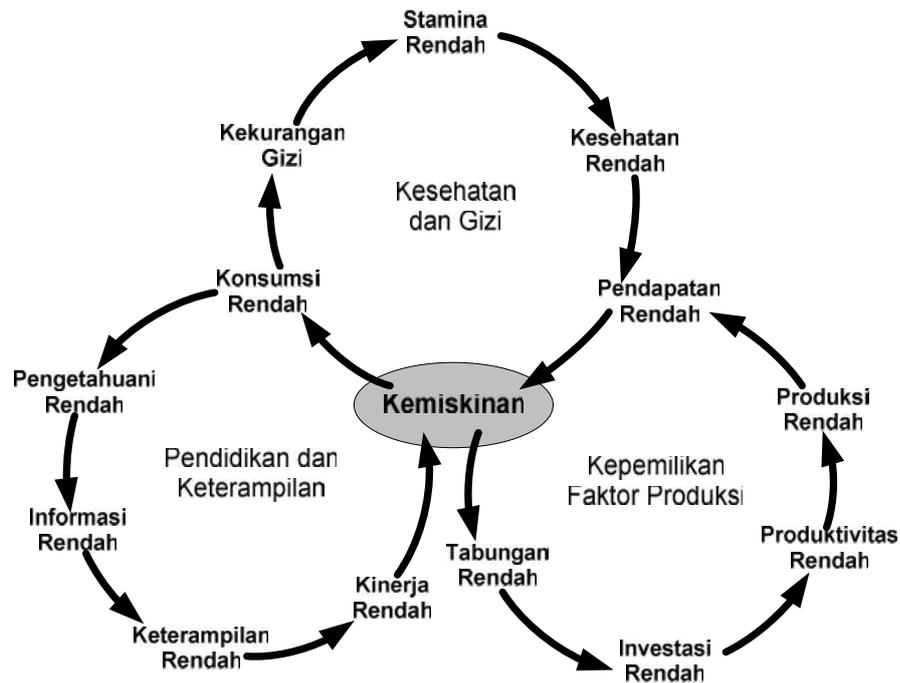
untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan.

Untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, prioritas program pengembangan difokuskan di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan atau kawasan andalan. Kawasan andalan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah: Pulau tebing Tinggi, Pulau Rangsang, Pulau Merbau, dan Pulau Padang. Berdasarkan informasi dan hasil kajian di lapangan, di daerah yang berpotensi dikembangkan pusat pertumbuhan. Perspektif pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) Pengembangan kawasan ekonomi khusus di Selatpanjang dan Ransang; 2) Pengembangan cluster industri berbasis pertanian; 3) Pengembangan kawasan pelabuhan dan industri dorak; 4) Pengembangan kawasan industri tebing tinggi barat; 5) Pengembangan kawasan industri pulau rangsang; 5) Pengembangan komoditas unggulan daerah dalam rangka ketahanan pangan operasi pangan Riau makmur (OPRM); 6) Pengembangan perikanan, penangkapan ikan dan budidaya ikan khususnya patin jambal dan pertambakan udang; 7) Pengembangan bidang peternakan khususnya ternak sapi, kambing, dan itik; 8) Revitalisasi perkebunan karet, kelapa, sagu, kopi dan kakao.

Pemerintah selalu mengembangkan program penanggulangan kemiskinan baik secara daerah maupun secara nasional. Kemiskinan di daerah pedesaan maupun di perkotaan terbentuk secara berantai. Sebuah keluarga miskin akan sulit keluar dari kemiskinan tersebut disebabkan berapa hal, antara lain: Pertama: Pendidikan dan keterampilan, keluarga miskin mempunyai kemampuan pengetahuan yang rendah dan berakibat kepada keterampilan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan tingkat keahlian yang dimiliki juga rendah. Secara berkesinambungan mereka ini memperoleh pendapatan yang rendah pula. Kedua: Begitu juga dari sisi kesehatan dan gizi. Keluarga miskin mempunyai gizi yang

tidak memadai dan menyebabkan stamina rendah yang berdampak terhadap kinerja rendah. Akhirnya bermuara kepada pendapatan yang rendah dan menyebabkan mereka tetap miskin. Ketiga: Kepemilikan faktor produksi. Keterbatasan pendapatan menyebabkan kemampuan menabung rendah dan tidak punya investasi. Kondisi ini akan berdampak terhadap pendapatan di masa datang. Pada Gambar 1 disajikan terbentuknya kemiskinan dengan menyajikan bentuk-bentuk lingkaran kemiskinan di pedesaan khususnya di wilayah pesisir.

Dari pendekatan yang selama ini dipakai, indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas. Dari data Bappenas (2004), indikator kemiskinan adalah, antara lain; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.



Gambar 1

Lingkaran Terbentuknya Kemiskinan di Pedesaan Wilayah Pesisir

Sumber: Hasil Penelitian Fundamental (Syahza, 2013)

Salah satu sebab meningkatnya kesenjangan dan kemiskinan antar daerah di masyarakat pedesaan adalah karena adanya distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan yang dikuasai kelompok ekonomi kuat, dimana mereka ini dekat dengan kekuasaan. Dampaknya terhadap kepemilikan faktor produksi seperti tanah, modal tidak merata dan tidak adil. Selain itu rendahnya teknologi produksi, sedikitnya teknologi pengolahan hasil, akses pemasaran serta rendahnya keterampilan menyebabkan mereka tidak dapat berbuat banyak untuk kegiatan produksi, akibatnya pendapatan mereka menjadi sangat rendah. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah pesatnya pembangunan sektor perkebunan, kegiatan HPH dan HTI telah mendesak mereka sehingga memberikan dampak negatif terhadap kepemilikan lahan bagi keluarga miskin di pedesaan.

Kriteria keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang berarti adanya penurunan

jumlah keluarga miskin. Penurunan jumlah keluarga miskin ini merupakan faktor terpenting, oleh karena itu selalu diupayakan dengan berbagai strategi kebijakan khusus melalui lintas instansi dan lintas program. Upaya penurunan banyaknya keluarga miskin diarahkan melalui pendekatan pemberdayaan dan perbaikan sektor ekonomi dengan pemberian pelatihan keterampilan, peningkatan akses ke sumber daya, dan bantuan modal usaha produktif. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan.

Menekan keluarga miskin dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan pedesaan. Menurut Syahza (2008), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat

dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: Pertama, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa; kedua, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; ketiga, pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan keempat, membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.

Kemiskinan di daerah terbentuk pada umumnya karena alasan klasik, yakni kekurangan modal usaha, lemahnya sumberdaya manusia, kurangnya akses pasar, infrastruktur yang tidak sempurna, lemahnya informasi, lemahnya kemampuan memanfaatkan peluang usaha. Dari sisi lain juga lemahnya pelayanan sosial untuk masyarakat terutama kesehatan dan pendidikan. Guna mengatasi masalah tersebut maka dilakukan penanggulangan kemiskinan dipedesaan. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah keluarga miskin. Strategi yang dimaksud antara lain: 1) memperbaiki program perlindungan sosial, terutama kesehatan, pendidikan, kelembagaan ekonomi dan nonekonomi di pedesaan; 2) meningkatkan akses pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bagi anak usia sekolah, mengurangi tingkat anak putus sekolah, memberikan harga yang layak terhadap kebutuhan pokok masya-

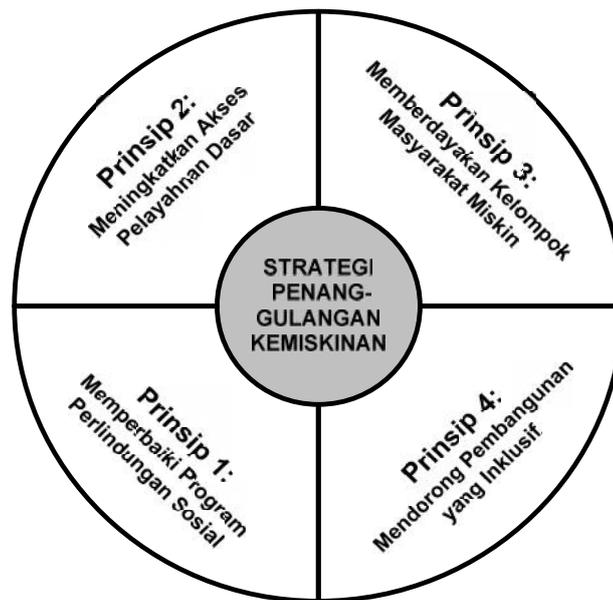
rakat miskin; 3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha, membuka peluang kerja dan usaha; 4) mendorong pembangunan yang inklusif di daerah pedesaan (TNP2K, 2012). Pada Gambar 2 disajikan strategi penurunan keluarga miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (*shocks*) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (*population ageing*) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.



Gambar 2

Strategi Penurunan Jumlah Keluarga Miskin

Sumber: TNP2K, 2012

Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat me-

ningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Program pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Cara dengan menciptakan mekanisme dari

dalam untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah (Pemberdayaan, 2009).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, sektor pertanian harus menjadi sasaran utama. Di pedesaan sebagian besar penduduknya menggantungkan nasibnya kepada sektor pertanian. Karena itu dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan diperlukan konsistensi. Hal itu harus menjadi konsepsi yang benar-benar memungkinkan masyarakat pedesaan untuk dapat bertahan dalam situasi perekonomian yang serba sulit seperti saat ini. Selain itu, meningkatkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kemandirian yang nantinya dapat menciptakan suasana kondusif. Jadi, hal itu memungkinkan masyarakat pedesaan untuk berkembang dan memperkuat daya saing serta potensi yang dimiliki. Salah satu strategi pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pengembangan agribisnis berwawasan lingkungan.

Pengembangan agribisnis ramah lingkungan merupakan perencanaan pembangunan pertanian di pedesaan dalam jangka panjang yang memperhatikan dukungan kekuatan alam secara berkelanjutan. Tingkat eksploitasi terhadap sumberdaya alam disesuaikan dengan daya dukung dan resitensi sumberdaya alam yang ada sehingga produktivitas sumberdaya setempat dari waktu ke waktu tetaplah stabil. Alternatif lain pengurusan atau pengrusakan akibat kegiatan agribisnis diupayakan ditanggulangi dengan penambahan investasi yang dikhususkan untuk mengembalikan mutu sumberdaya

alam. Konsekuensi logis dalam melaksanakan pembangunan pertanian adalah mendorong inovasi kelembagaan dengan keahlian yang meliputi pengetahuan pasar, agribisnis dan keuangan pedesaan (Kusnandar *et al*, 2013).

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marginalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (*top-down*). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (*pusat*), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Prinsip keempat dalam pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang

dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat *multiplier effect* pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan. Dengan strategi tersebut akan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal.

Desa tertinggal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Beberapa dari daerah miskin ini merupakan sumberdaya alam yang cukup kaya tetapi masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Di samping itu dengan program pemberdayaan masyarakat desa tertinggal ini akan mengurangi ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar daerah. Salah satu usaha mengurangi ketimpangan pendapatan adalah melalui pembangunan pertanian di pedesaan.

Kesenjangan di daerah tertinggal semakin diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan non-pertanian (ekonomi perkotaan). Adanya daerah-daerah tertinggal ini tidak hanya membawa kemiskinan bagi masyarakat tetapi dalam jangka panjang kesenjangan yang bersifat akumulatif ini akan menyebabkan daerah yang tertinggal akan semakin jauh tertinggal sementara yang maju akan tetap maju dengan percepatan yang semakin sulit dikejar. Hal ini karena adanya perbedaan sumberdaya manusia, pertumbuhan awal dan hasil pembangunan berjalan yang secara akumulatif mendorong pertumbuhan selanjutnya sehingga akselerasi pembangunan di kedua daerah berbeda. Kesenjangan ini hanya dapat diatasi bila ada intervensi pemerintah dengan cara mengontrol daerah tertinggal sehingga basis

perekonomian menjadi terangkat untuk memacu pertumbuhan dan bersaing secara lebih fair dengan daerah lain.

Pusat pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan efek tetesan ke bawah (*trickling down effect* atau *spread effect*) dan efek polarisasi (*polarization effect* atau *backwash effect*) pada wilayah yang ada disekitarnya (*hinterland*), pendapatan wilayah akan lebih besar jika investasi pembangunan dikonsentrasikan pada pusat pertumbuhan dibandingkan jika investasi pembangunan yang sama digunakan secara menyebar dalam seluruh wilayah yang bersangkutan. Efek pusat pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah sekitarnya masih bersifat umum, yaitu pusat-pusat pertumbuhan akan menyebarkan efek yang beraneka ragam terhadap perekonomian wilayah sekitarnya melalui saluran yang beraneka ragam pula. Pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan berkembang industri-industri yang akan memancarkan berbagai bentuk keuntungan (*spread effect*) ke wilayah sekitarnya berupa permintaan hasil-hasil produksi dari wilayah sekitarnya sehingga perekonomian wilayah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi akan ikut berkembang.

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merupakan daerah maju akan memberikan dua jenis efek ekonomi yang langsung terhadap wilayah sekitarnya yakni efek yang menyenangkan dan efek yang tidak menyenangkan. Efek yang dikemukakan pertama adalah efek menyebar ke bawah (*trickling down effect*) yaitu meningkatnya pembelian hasil-hasil produksi dan terserapnya tenaga kerja menganggur dari wilayah sekitar oleh industri-industri yang ada di pusat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan efek yang tidak menyenangkan adalah efek polarisasi (*polarization effect*) yakni semakin lemahnya daya saing industri-industri yang ada di wilayah sekitar terhadap industri yang serupa di pusat pertumbuhan ekonomi sebagai akibat adanya penghematan aglomerasi.

Program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh pemerintah secara

nasional maupun di tingkah daerah. Pemerintah telah melakukan beberapa program secara nasional maupun daerah, antara lain: 1) Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) melalui bantuan modal; 2) Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT); 3) Program dalam rangka Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE); 4) P2MPD; 5) PPK; 6) Program PNPM mandiri Pedesaan; 7) P2KP; 8) Program RLH (Rumah Layak Huni); 9) Program UMKM; 10) BLT (Bantuan Langsung Tunai); 11) BOS (Bantuan Operasional Sekolah); 12) Program Raskin; 13) OPRM (Operasi Pangan Riau Makmur); 14) Program pengentasan kemiskinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur (K2i).

Terkait dengan beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan untuk mencapai visi Indonesia tahun 2020 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain: 1) menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; 2) mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; 3) menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; 4) meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan 5) membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin (Kompasiana, 2012). Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat ditanggulangi sedikit demi sedikit.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Kemiskinan di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih

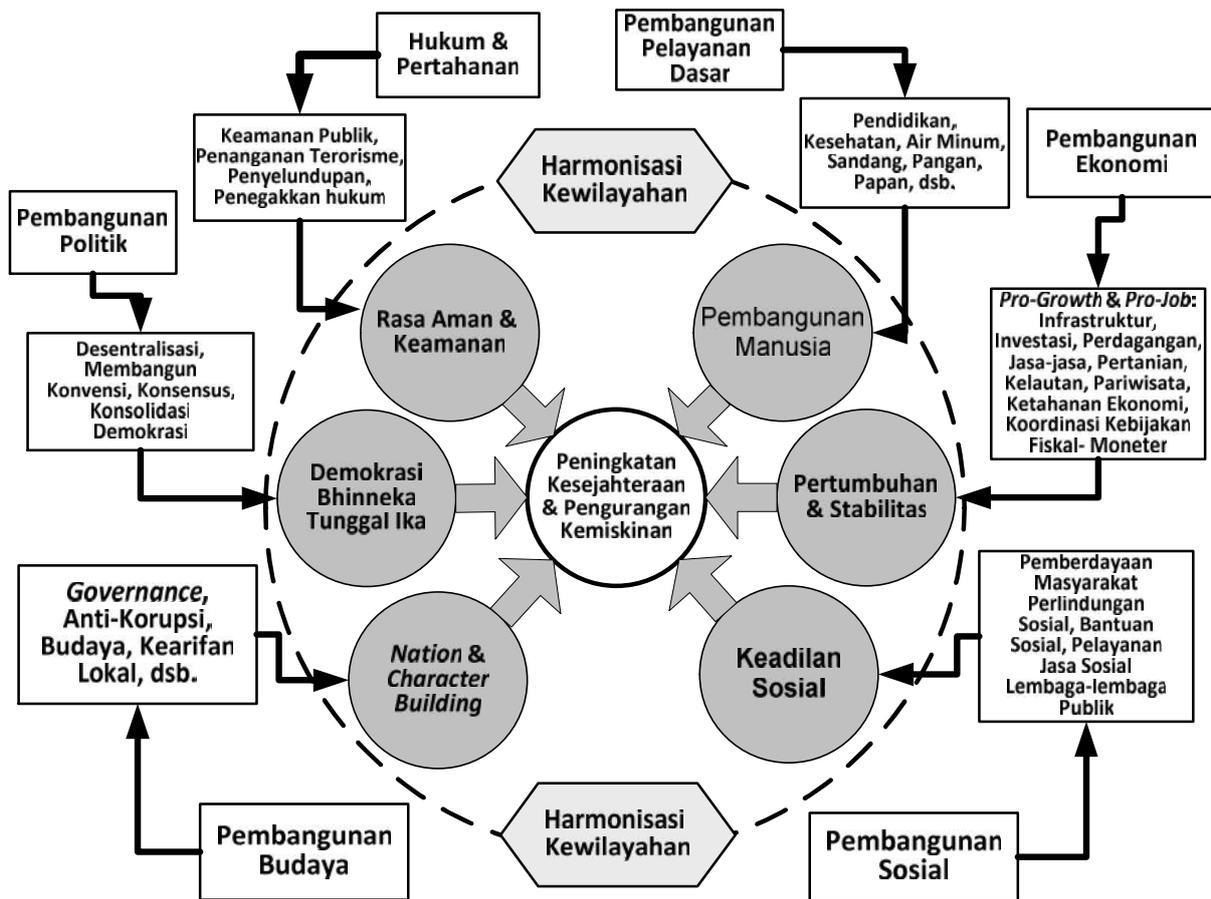
bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak ditanggulangi akan dapat mengganggu pembangunan nasional. Dalam konteks ini, beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggerakkan sektor real melalui sektor UMKM. Beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain, pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha. Kedua menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro. Ketiga menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan menejerial. Keempat memperbesar akses perkreditan pada lembaga keuangan. Dengan empat langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan. Kemiskinan akan makin bertambah seiring tidak terjadinya pemerataan pembangunan (Kompasiana, 2012).

Terkait dengan penanggulangi penurunan jumlah keluarga miskin, pada Gambar 3 disajikan model penurunan jumlah keluarga miskin melalui pendekatan lintas sektoral. Komponen yang terlibat dalam rangka penurunan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) hukum dan pertahanan termasuk kesadaran masyarakat yang bermuara kepada rasa aman dan keamanan; 2) pembangunan politik dalam masyarakat yang dimulai dari bangku sekolah yang bermuara kepada kecintaan terhadap negara kesatuan republik Indonesia; 3) pembangunan budaya termasuk melestarikan kebudayaan lokal yang targetnya kepada pembentukan manusia berkarakter; 4) pembangunan sosial yang bermuara kepada rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat; 5) pembangunan ekonomi dan memacu pertumbuhan yang stabil dan kesejahteraan masyarakat; 6) pembangunan

pelayan dasar yang menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas dan mempunyai jiwa kewirausahaan.

Pelaksanaan program tersebut seharusnya melibatkan semua komponen, antara lain: pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, dan perguruan tinggi. Program penanggulangan kemiskinan bukan berarti menghabiskan orang miskin, melainkan program tersebut harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar keluarga miskin tersebut. Bagi keluarga miskin kebutuhan dasar terpenuhi dan kebutuhan pokok tidak membebankan beban keluarga, maka kesejah-

teraan mereka akan meningkat. Untuk itu program penanggulangan kemiskinan harus berupaya untuk menciptakan lapangan kerja dan usaha sebagai sumber pendapatan bagi keluarga miskin. Secara umum keluarga miskin memang sulit untuk ditingkatkan kesejahteraannya, hal tersebut terkait dengan kepemilikan faktor produksi seperti tidak punya lahan sebagai tempat berusaha, kekurangan modal untuk mengembangkan usaha, tidak punya keahlian dalam berusaha, dan keluarga miskin hanya memiliki sumberdaya manusia yang kualitasnya rendah atau hanya sebatas tenaga kerja tidak terdidik.



Gambar 3
Model Penurunan Jumlah Keluarga Miskin Melalui Pendekatan Lintas Sektoral di Wilayah Pesisir

Sumber: TNP2K, 2012, telah dimodifikasi

Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu proyek pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan. Pengertian pemerataan pendapatan masih belum diberikan secara jelas, karena para ahli ekonomi umumnya hanya memperhatikan jumlah pendapatan itu sendiri tanpa memperhatikan dari manakah asalnya pendapatan itu. Sekelompok masyarakat dapat saja memperoleh jumlah pendapatan yang sama, namun pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut belum tentu akan sama besarnya. Karena itu para ahli ekonomi dalam merencanakan pemerataan ini umumnya lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan individual, kemudian mengelompokkannya pada suatu ukuran tertentu. Kelompok-kelompok berdasarkan pendapatan tersebut kemudian diukur dan dianalisis. Dari hasil yang diperoleh kemudian disusun perencanaan untuk menentukan langkah-langkah kebijaksanaan yang dapat diambil.

Kalau ditelaah lebih lanjut tentang sasaran pembangunan yakni pemerataan pembangunan masih merupakan tanda tanya yang patut dikaji terutama bila dikaitkan dengan aspek spasialnya. Apakah dengan semakin tumbuh dan berkembangnya investasi swasta yang ditandai dengan semakin pesatnya penanaman modal baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri akan memperkecil disparitas spasial?

Jika jawaban atas pertanyaan tersebut tidak, jelas yang terjadi selama ini adalah *polarization effect* yang ditandai dengan mengalirnya modal dan tenaga kerja dari daerah yang belum berkembang ke daerah yang telah berkembang dan *spread effect* serta *strikling down effect* (banyaknya bahan baku dari daerah yang belum berkembang yang dapat dipasarkan ke daerah yang telah berkembang karena kebutuhan di daerah tersebut meningkat) yang diharapkan malah tidak terjadi. Akibat yang dirasakan adalah daerah yang sudah berkembang se-

makin berkembang dan di daerah tersebut akan terjadi penumpukan kegiatan industri, sementara daerah-daerah lain semakin tertinggal dan tidak diminati oleh investor. Adanya hal-hal yang dikemukakan di atas mendorong keharusan adanya *government intervention* (campur tangan pemerintah) untuk mengurangi tingkat *Regional Inequalities* tersebut.

Memacu ekonomi di daerah tertinggal perlu juga membuka peluang pasar bagi produk pedesaan terutam untuk sektor pertanian. Selama ini pemasaran produk pertanian di pedesaan menghadapi berbagai kendala, khususnya bagi petani berskala kecil. Masalah utama yang menyebabkan harga dapat dipermainkan oleh mafia pemasaran adalah melalui titik lemah produk pertanian, antara lain: 1) kesinambungan produksi; 2) kurang memadainya pasar; 3) panjangnya saluran pemasaran; 4) rendahnya kemampuan tawar-menawar; 5) berfluktuasinya harga; 6) kurang tersedianya informasi pasar; 7) kurang jelasnya jaringan pemasaran; 8) rendahnya kualitas produksi; dan 9) rendahnya kualitas sumberdaya manusia (Syahza. A dan Henny, 2010).

Seperti yang diungkapkan Tobari dan Budi Dharmawan (2004). Pembangunan wilayah melalui pendekatan sektor harus mampu memanfaatkan keunggulan komparatif dari setiap wilayah, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi pada wilayah tersebut. Pembangunan dapat dijadikan sebagai pilar pembangunan ekonomi wilayah. Pembangunan wilayah melalui pendekatan sektor pertanian harus mampu memanfaatkan keunggulan komparatif setiap wilayah yang berbeda. Dengan perbedaan keunggulan komparatif tersebut akan menyebabkan masing-masing daerah mempunyai cara pengembangan potensinya. Potensi yang dimiliki tersebut merupakan sektor basis yang mempunyai nilai tambah tinggi jika dikembangkan secara agribisnis.

Peluang untuk diteliti kembali

Apabila diamati pembangunan di Daerah Riau yang terjadi selama ini, adalah *polarization effect*, seperti terjadinya urbanisasi oleh tenaga kerja pedesaan, pemusatan industri pengolahan di daerah perkotaan. Sementara *spread effect* serta *striking down effect* yang diharapkan malah tidak terjadi, seperti tidak berminatnya investor melakukan investasi di daerah pedesaan (sumber bahan baku). Akibat yang dirasakan adalah daerah yang sudah berkembang semakin berkembang dan di daerah tersebut akan terjadi penumpukan kegiatan industri, sementara daerah-daerah lain semakin tertinggal dan kurang diminati oleh investor.

Supaya terjadi *spread effect* serta *striking down effect* yang diharapkan di pedesaan untuk percepatan pembangunan dan meningkatkan nilai tambah komoditi lokal di pedesaan maka sangat diperlukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan pedesaan. Untuk melahirkan kebijakan tersebut sangat diperlukan penelitian lebih lanjut yang sangat komprehensif. Penelitian tersebut terkait dengan pendekatan lintas sektoral pedesaan, antara lain: pembangunan ekonomi, pembangunan budaya, pembangunan sosial, pembangunan politi, pembangunan pelayan dasar, dan pembangunan politik serta pertahanan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam upaya menciptakan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai *hinterland* KEK Batam, diperlukan arah pengembangan antara lain memperkuat fungsi Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, infra struktur, peningkatan sumber daya manusia tempatan, pariwisata, yang kesemuanya itu tentunya haruslah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Meranti itu sendiri.

Strategi untuk mengurangi jumlah keluarga miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan melalui kegiatan, antara

lain: 1) memperbaiki program perlindungan sosial, terutama kesehatan, pendidikan, kelembagaan ekonomi dan non-ekonomi di pedesaan; 2) meningkatkan akses pelayan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bagi anak usia sekolah, mengurangi tingkat anak putus sekolah, memberikan harga yang layak terhadap kebutuhan pokok masyarakat miskin; 3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha, membuka peluang kerja dan usaha; 4) mendorong pembangunan yang inklusif di daerah pedesaan.

Program yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menanggulangi kemiskinan tertuju kepada lima kegiatan, antara lain: 1) menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; 2) mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; 3) menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; 4) meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan 5) membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Pengembangan daerah pedesaan dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti hendaknya dilakukan dengan pendekatan lintas sektoral, antara lain: 1) pendekatan hukum dan pertahanan termasuk kesadaran masyarakat yang bermuara kepada rasa aman dan keamanan; 2) pembangunan politik dalam masyarakat yang dimulai dari bangku sekolah yang bermuara kepada kecintaan terhadap negara kesatuan republik Indonesia; 3) pembangunan budaya termasuk melestarikan kebudayaan lokal yang targetnya kepada pembentukan manusia berkarakter; 4) pembangunan sosial yang bermuara kepada rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat; 5) pembangunan ekonomi dan memacu pertumbuhan yang stabil dan kesejahteraan masyarakat; 6) pembangunan pelayan dasar yang menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas dan mempunyai jiwa kewirausahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Alim. MK, 2007, Negara vs Kemiskinan Di Pedesaan, <http://uploadoverload.blogs-friendster.com>, 10 Agustus 2013.
- Bappenas. 2004. Pokja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Komite Penanggulangan Kemiskinan, <https://openlibrary.org/publishers>, diakses 15 April 2013.
- Basri. M., 2007. *Desa dan Kemiskinannya*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/30/Jabar/11719.htm>, diakses 31 Maret 2012.
- Edy, L. 2009. 28 Desa Tertinggal Dapat Penghargaan Presiden RI, <http://ads2.kompas.com/kpdt/index.php/news>, diakses 23 Januari 2013.
- Kompasiana, 2012., Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah Kemiskinan, <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/>, diakses 18 Oktober 2012.
- Kusnandar., D W. Padmaningrum, W. Rahayu, dan A. Wibowo., 2013. Rancang Bangun Model Kelembagaan Agribisnis Padi Organik Dalam Mendukung Ketahanan Pangan, dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14(1): 92-101. Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2012., *Data Statistik Otonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*, Pemda kabupaten Kepulauan Meranti, Selat Panjang.
- Pemberdayaan., 2009, Konsep Pemberdayaan, Membantu Masyarakat Agar Bisa Menolong Diri Sendiri, <http://www.pemberdayaan.com/pembangunan>, diakses 4 April 2013.
- Kastaman. R., 2007, Upaya Peningkatan Pendapatan Petani yang Maksimal Melalui Pengaturan Pola Pemilihan Komoditi Model Sinergi. *Jurnal Sosiohumaniora* 9(3): 211-225. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Suhendra. I., 2010, Faktor Penentu Investasi Swasta di Indonesia, dalam *Jurnal Ekonomi* 15: 131-150. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Sumaryo., 2011. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tingkat Keberdayaan Ekonomi Rumah Tangga. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12(2): 272-280. Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Suyono. H. 2007. Gerakan Nasional Pemberdayaan Masyarakat. (On-line). <http://www.hupelita.com/baca.php?id=27511>, diakses pada 31 Juli 2012.
- Sahdan. G. 2009. Menanggulangi Kemiskinan Desa, <http://www.ekonomirakyat.org>, diakses 6 Desember 2013
- Syahza, A. 2005. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau. *Jurnal Ekonomi* 10: 220-231. PPD dan I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2007. Percepatan Pemberdayaan Ekonomomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit. *Jurnal Ekonomi* 12:106-118. PPD dan I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2008, Model Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Ekonomi* 13: 60-70, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2013. *Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemetaan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir* (Penelitian Fundamental Tahun II), Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.
- ., 2013. Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14(1): 126-139. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syahza, A dan Suarman., 2008, Pemasaran Produk Pertanian Melalui Koperasi Berbasis Agribisnis. *Jurnal Sorot* 3(1): 9-

20. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Syahza, A dan I. Henny., 2010. Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis di Daerah Pedesaan. *Jurnal Sosiohumaniora* 12(3): 207-220. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Syamsuar. 2010. Harapan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Makalah pada seminar: *Peluang dan Tantangan Kabupaten Meranti dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Balitbangda Propinsi Riau, Pekanbaru.
- Tobari., dan B, Dharmawan. 2004. Profil Pengembangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Pedesaan* 4(2): 129-137. Lembaga Penelitian Universitas Soedirman Purwokerto.
- TNP2K. 2012. Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, *http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas*, diakses 17 Mei 2013.
- Zainal. R, 2010., Menciptakan Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai Hiterland Free Trade Zone Batam, Makalah pada seminar: *Peluang dan Tantangan Kabupaten Meranti dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Balitbangda Propinsi Riau, Pekanbaru.